**Gerakan Sosial Warga Parang Kusumo Pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park**

**Ahmad Izudin**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*

*Email: ahmad.izudin@uin-suka.ac.id*

**Suyanto**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*

*Email: suyanto@uin-suka.ac.id*

**Abstract**

This paper aims to describe about unravel the tangled thread of the case of the eviction of Parang Kusumo residents in Bantul Regency, Yogyakarta. The central point outlined in this study is to explain the dynamics of social movements of people affected by evictions due to the Geo Maritim Park development plan. Analysis obtained from observations of field data through indept-interview with purposive sampling method shows that the case of the resistance movement of people affected by eviction experienced a ‘defeat’ in the public space. The defeat was identified because the strength of legal legality (land certificates) owned by residents was not strong and some even refused demonstrations initiated by the People’s Alliance to Refuse Eviction (*Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran*—ARMP). As a case in the vortex of conflict, the people’s struggle to seize their rights was captured by elitist interests in the Sultan’s ground and the Pakualaman’s ground.

**Intisari**

Artikel ini hendak mengurai benang kusut kasus penggusuran warga Parang Kusumo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Menjadi titik sentral yang diuraikan dalam kajian ini adalah menjelaskan dinamika gerakan sosial warga yang terkena dampak penggusuran akibat rencana pembangunan Geo Maritim Park. Analisa yang di dapat dari hasil pengamatan data lapangan melalui *indept-interview* dengan metode *purposive sampling* memperlihatkan bahwa kasus gerakan perlawanan warga terkena dampak penggusuran mengalami ‘kekalahan’ di ruang publik. Kekalahan tersebut teridentifikasi karena kekuatan legalitas hukum (sertifikat tanah) yang dimiliki warga tidak kuat bahkan sebagian menolak aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Sebagai kasus yang berada dalam pusaran konflik, perjuangan warga untuk merebut hak-hak mereka tersandra oleh kepentingan elitis dalam bingkai *sultan ground* dan *pakualaman ground*.

**Keywords:** social movement; conflict; oligarchy; defeat of citizenship

**Pendahuluan**

Jogja adalah kota pelajar yang dipenuhi dengan puluhan universitas berhimpitan dan ribuan mahasiswa berdesakan. Mulai dari sabang hingga merauke dengan sengaja datang hanya untuk sekedar menimba ilmu bahkan ada yang sampai mendapatkan jodoh hingga menetap di kota ini. Suasana romantis, *rukun, guyub, tentrem,* adalah keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Tak hanya itu, kota ini menawarkan sejuta hasrat untuk bermukim di wilayah yang bertahan dengan tradisi keratonnya juga menyajikan ketenangan dan kenyamanan. Semua perasaan apik itu, sepertinya sudah tak semanis gula yang dikerumuni semut untuk saat ini. Setelah ragamnya peristiwa konflik sosial yang menghiasi Jogja. Susana kebatinan warga yang ditinggal di tanah kerajaan Mataram Islam, seolah tersandra oleh kerumunan masalah agraria. Alih-alih negara melakukan reforma agraria, tampaknya tidak berimbas bagi kehidupan masyarakat Jogja.

Realitas menunjukan bahwa betapa *absurd*nya masalah agraria yang ada di negeri ini. Pada mulanya adalah kehendak untuk melawan masalah kesadaran “*imperial englishness*” sebagai sisa kejayaan kapitalisme yang melahirkan konsep pembangunan *welfare state*. Fenomena pembangunan *welfare state* menjadi nisbat penindasan dan perampasan tanah yang tidak dapat dihindari. Di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan kapitalisme yang menciptakan budaya pragmatisme masyarakat menuju *new era millenium*. Tak heran, semakin semerbaknya budaya instan yang menyebabkan bobroknya sistem birokrasi negeri ini karena memperbolehkan investor kelas kakap mengembangkan sayapnya. Dengan membuka cabang-cabang perusahaan mereka sehingga mengikis agraria untuk kepentingan bisnisnya [[1]](#footnote-1).

Cara-cara lain untuk mengikis agraria yang dijadikan sebagai kepentingan bisnis investor kelas kakap bekerjasama dengan para birokrat negeri ini. Politik oligarki dan transaksional menjadi jurus jitu melemahkan kekuatan masyarakat. Kedaulatan negara seolah tersandara oleh kepentingan elit. Studi yang menjelaskan ini pun banyak menyingkap tabir kepalsuan yang dimotori pejabat-pejabat daerah. Misalnya di Madura, Banten, Wakatobi, dan beberapa kawasan lain [[2]](#footnote-2). Tanpa disadari, itulah awal penyebab konflik yang dapat merampas tanah dan kedaulatan warga [[3]](#footnote-3). Ironisnya, cara-cara baru yang ditawarkan dalam penyelesaian konflik jauh dari kata sepakat. Warga harus membayar kerugian (*opportunity cost*) yang luar biasa besar, yaitu penggusuran dan kerusakan ekologi [[4]](#footnote-4).

Kerugian masyarakat harus di bayar dengan cucuran keringat bahkan darah sekalipun. Gerakan perlawanan terhadap sikap arogansi penguasa dan pengusaha ternyata harga yang tak dapat ditawar. Dulu kita masih mengenal gerakan bersifat diam-diam, terselubung, tidak eksplotatif, tidak ada kekacaun, mendahulukan selamat, gerakan yang tidak terorganisir dan perlawanan primitif (*old social movement*). Sulit tampaknya jika hari ini gerakan perlawanan masih seperti itu. Dua pilihan advokasi dan pendampingan syarat yang mutlat harus saling berkaitkelindan yang lebih terbuka, eksploitatif, demonstratif, dan demokratis [[5]](#footnote-5).

Tampak nyata jika masyarakat yang terkena dampak penggusuran akibat konflik dan oligarki ada di Parang Kusumo. Dalih pembangunan Geo Maritim Park yang menjadi agenda Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), bukti kegamangan negara mengakomodir aspirasi warga terkena dampak. Sejauh ini memang belum ada studi yang menjelaskan kasus Geo Maritim Park di Parang Kusumo Kabupaten Bantul. Namun bila kita belajar pada kasus yang terjadi di Karawang dan Sumedang, betapa nyata peran negara melakukan berbagai cara untuk merampas tanah melalui tangan pihak ketiga, yakni perusahaan multinasional [[6]](#footnote-6).

Melalui uraian singkat pada tulisan ini, saya hendak mengkaji tentang gerakan perlawanan dan upaya penyelesaian konflik warga Parang Kusumo dalam mempertahankan tanah mereka. Gerakan perlawanan ini merupakan kajian yang fokus pada proses dari cita-cita pembaruan agraria. Agar mendapatkan keadilan atas hak tanah yang hari ini masih tersandra oleh kepentingan elit politik lokal dan pengusaha untuk dijadikan lahan bisnis, seperti hotel, mall, pabrik, dan lainnya. Dengan demikian, studi ini bermaksud untuk menyumbangkan ide segar pada perkembangan ilmu sosiologi menyoal konflik sosial. Hasil kajian pun tidak memberikan *blue print* tapi lebih kepada capaian diskursus sehingga dapat diperdebatkan secara dealektis dan akademis.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*). Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada aktor-aktor, baik pemerintah maupun masyarakat, yang terlibat pada konflik di pembangunan Geo Maritim Park. Informan terdiri dari 4 dari pemerintah (Satpol PP Kab. Bantul, Petugas Dinas Pariwisata Kab. Bantul, Pemerintah Desa Parang Kusumo, dan RT setempat) dan 7 dari masyarakat (ARMP, Walhi, JDA, dan Gema Pembebasan). Untuk melengkapinya, peneliti mengumpulkan data-data terkait dengan kasus penggusuran warga Parang Kusumo, baik sumber informasi yang terbit dalam Jurnal Ilmiah maupun Buku Elektronik.

Dalam membuktikan otentitas penelitian, selanjutnya peneliti menggunakan teknik pengambilan data observasi dan dokumentasi yang berupa *field note* dan foto-foto aksi demonstrasi[[7]](#footnote-7). Dari data-data ini kemudian peneliti melakukan analisa dengan tiga metode, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab-akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan [[8]](#footnote-8).

**Oligarki dan Resisi Individual dalam Gerakan Sosial**

Dalam terminologi klasik, oligarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang dan dikendalikan oleh sekelompok individual. Tetapi, pengertian ini masih kurang relevan bila dikontekskan dengan dimensi sosial baru, khususnya di tanah leluhur para raja, karena sudah seyogyanya kerajaan merupakan bagian dari oligarki itu sendiri. Maka menterjemahkan oligarki dalam aspek ini adalah seseorang dapat dikatakan oligarki bila; (1) memiliki hak politik, (2) memiliki jabatan resmi birokrasi pemerintahan, (3) memiliki jabatan pemaksaan (koersif), (4) memiliki kekuasaan secara material, dan (5) memiliki kekuasaan secara mobilisasi massa [[9]](#footnote-9).

Dari kriteria atas makna oligarki tersebut, maka dapat diambil satu point yang disesuaikan dengan kajian ini adalah sekelompok orang lokal yang memiliki peran dalam legitimasi kekuatan politik sehingga mampu menjadi penguasa dan dapat mempengaruhi orang-orang atau warga masyarakat. Menurut Weber, orang kuat lokal yang memiliki kekuatan politik sehingga mampu mengontrol birokrasi pemerintahan, mereka setidaknya harus memiliki dua unsur penting, yaitu karisma dan otoritas[[10]](#footnote-10). Karisma adalah orang yang memiliki pengaruh secara kekuatan massa. Sedangkan, otoritas adalah orang yang memiliki pengaruh secara kepemimpinan dalam partai politik sehingga ia mampu melegitimasi kebijakan.

Dua unsur penting yang diungkapkan Weber di atas, dapat semakin kuat bagi orang-orang lokal karena dominasi kekuasaan pasca kejatuhan Suharto semakin semarak dengan dukungan konsep desentralisasi. Dengan konsep ini semakin menunjukan kekuatan bagi oligarki lokal yang mendapat sokongan sistem demokrasi liberal sehingga lahirnya predatoris yang menggunakan cara-cara politik uang dan premanisme. Pembajakan atas sistem demokrasi ini sudah berlangsung hampir lebih kurang 17 tahun ke belakang, pasca reformasi, yang membuat kebijakan di daerah tidak terkendali [[11]](#footnote-11). Tak hanya itu, perlawanan orang lokal pun semakin kuat karena disinyalir kebijakan pemerintah daerah tanpa ada kontrol langsung dari negara.

Di balik itu, kekuatan perlawanan dari warga masyarakat terhadap oligarki politik lokal semakin mengeliatkan gerakan sosial yang semakin mempermudah akses bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam retoris dan logika berpikir sepadan dengan kaum oligarki politik lokal. Posisi ini menjadi sebuah catatan penting bagi kaum tertindas yang merasa kehidupan mereka terancam. Hal yang menandai gerakan sosial yang semakin kuat ini dengan adanya organisasi-organisasi basis massa yang secara organisatoris kuat dengan peningkatan kapasitas wadah masing-masing gerakan massa. Inilah yang menjadi modal penting bagi gerakan perlawanan warga (*civil society*) yang mempertahankan eksistensi hidup mereka dalam merubah keadaan menjadi lebih baik.

**Gerakan Sosial Pada Kasus Penggusuran Warga Parang Kusumo**

Gerakan sosial belakangan menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Kemunculan idiom-idiom baru pada ranah akademik menjadi bukti otentik semakin berkembangnya ilmu gerakan sosial. Mulai dari gerakan sosial petani, buruh dan mahasiswa. Di era kontemporer, studi gerakan sosial telah bermetamorfosa arah dan tujuannya. Skup gerakan sosial yang terjadi banyak isu yang mengangkat tentang perlawanan atas hegemoni dan oligarki politik di setiap kawasan. Tak heran bila kita menyaksikan banyak peristiwa gerakan sosial yang dilakukan elemen masyarakat mengalami kekalahan.

Kekalahan masyarakat pada ranah gerakan sosial ini disebakan oleh multifaktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terus berdiaspora seiring dengan semakin berkembangnya studi-studi gerakan sosial di lapangan. Mulai dari sejarah pemberontakan petani banten 1888 [[12]](#footnote-12) dan gerakan mahasiswa 1998 [[13]](#footnote-13). Di lain konteks, gerakan sosial yang terjadi ada keterkaitan yang padu antara oligarki dan politik [[14]](#footnote-14). Belajar dari studi terdahulu, gerakan sosial telah banyak mengalami kekalahan di ruang publik. Entah karena kalah peran politik dalam struktur pemerintahan maupun kalah oleh peran investor.

Begitupun juga yang dialami oleh warga pantai Parangkusumo. Data lapangan menunjukan hal serupa. Di mana masyarakat yang bergumul melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak terkait mengalami kekalahan. Pengalaman lapangan menunjukan kepada kita betapa rapuhnya gerakan perlawanan masyarakat. Ini terjadi karena soliditas yang dibangun oleh warga yang menolak penggusuran tidak padu dan tujuannya berbeda-beda. Mulai dari status tanah di kawasan Pantai Parangkusumo yang masuk ke dalam zona *Sultan Ground* juga karena status kependudukan warga yang tidak jelas. Bahkan, catatan kependudukan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, hampir 70% warga yang menolak penggusuran bukan asli masyarakat sekitar (Dokumentasi, 2018). Sebagaimana dalam catatan peneliti, warga yang melakukan penolakan penggusuran ada banyak yang berasal dari luar Jogja—misalnya berasal di Boyolali, Purworejo, Klaten, dan beberapa kawasan lain di luar DIY.

Namun demikian, klaim kekalahan gerakan sosial warga yang menolak penggusuran di Parangkusumo tidak elok jika hanya menjelaskan secara sepihak. Pada posisi ini penting bagi peneliti untuk memetakan potensi gerakan sosial yang terjadi dan peran strategis baik warga maupun aktor oligarki politik di dalamnya. Potensi dan peran strategis ini dapat dipetakan berdasarkan hasil interpretasi peneliti yang sesuai dengan data-data otentik lapangan.

*Gerakan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP)*

Berawal dari keyakinan warga yang sudah tinggal dan hidup selama bertahun-tahun. Warga terdorong untuk membentuk perkumpulan. Nama perkumpulan ini di kenal dengan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) yang terbentuk tahun 2008. Dari perkumpulan ini bergema menjadi basis perjua ngan warga yang bercita-cita mempertahankan hak tanah mereka. Perjuangan hak atas tanah berujung kepada gerakan sosial yang terkoordinir dan masif. Tidak lain alasan yang paling kuat melakukan gerakan perjuangan itu ditengarai oleh semakin maraknya kasus agraria di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dampak dari kasus agraria yang berkepanjangan membuat warga semakin terusik dan merasa di khianati oleh rezim penguasa.

Kekuatan basis masa menolak penggusuran lahan beracuan kepada Keppres 33 dan Perda DIY No. 3 Tahun 1984. Dua landasan hukum ini menjadi modal kuat warga untuk terus berjuang mempertahankan eksistensi kehidupan mereka. Dalih dihapusnya *sultan ground* menjadi alasan lain warga menolak penggusuran. Tak ayal, jika kini ARMP menjadi kekuatan misioner dalam berjuang mempertahankan hak atas penggunaan tanah yang ditinggali dan menjadi sumber penghidupan.

Dari mana pangkal mula dimulainya gerakan ARMP itu? Tepatnya, pasca diresmikan *Parangtritis Geomaritine Science Park* (PGSP) oleh Sri Sultan HB X pada 12 September 2015. Peresmian PGSP berlokasi di Dusun Parang Kusumo Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Pembangunan PGSP sendiri dilaksanakan Laboratorium Geopasial Parangtritis, yang didirikan tahun 2006 oleh Badan Informasi Geopasial (BIG), bekerjasama dengan Fakultas Geografi UGM, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tiga konsorsium ini bertekad untuk terus mengembangkan PGSP.



Gambar 1. Kode A merupakan Lokasi Geomaritim Bantul Dengan Konsep Pengembangan Pariwisata ‘Segoro Kidul’.

Peresmian PGSP berujung pada konsekuensi konservasi lahan. Konservasi ini di bagi menjadi tiga zona. Zona pertama adalah kawasan inti, seluas 114 hektar. Zona kedua adalah kawasan terbatas dengan luas 95 hektar. Zona ketiga adalah kawasan penyangga seluas 111 hektar (Karman, 2018a). Disinilah awal cerita perjuangan warga yang tergabung dalam ARMP di mulai. Mereka merasa bahwa konservasi lahan akan berbuntut panjang. Buntut ini disinyalir dapat merampas hak warga. Begini penuturan Kawit “Pendapat saya sebagai warga, penggusuran itu merampas Hak Asasi Manusia dan sumber kehidupan, terutama di bidang ekonomi warga terdampak” (Kawit, 2018a).

PGSP menjadi prahara bagi warga Parang Kusumo. Terlebih maraknya kasus agraria di DIY—setidaknya lebih dari 20 kasus agraria sampai tahun 2016—membuat sadar para aktivis. Solidaritas mengatasnamakan panggung rakyat (LBH Yogyakarta, Aliansi Mahasiswa Papua, Aliansi Keutuhan Republik Indonesia, dan Gema Pembebasan), aliansi-aliansi aktivis mulai berdatangan memberi simpati ketika kasus penggusuran warga Parang Kusumo. Aksi demontrasi penolakan penggusuran pun tak terhindarkan.

Soliditas yang diinisiasi oleh ARMP dan berbagai aliansi semakin kuat ketika proses penggusuran berlangsung. Proses advokasi ligitasi dan non ligitasi semakin bertali erat. Audiensi dengan pihak pemerintah, aksi demonstrasi hingga kemenangan gerakan penolakan penggusuran pun berhasil untuk sesaat. Kisah awal proses advokasi pun dapat dikatakan memenuhi target strategis para aktivis. Tatkala pemerintah membuka diri, setelah negosiasi alot, memberikan ruang pemberian ganti rugi kepada warga yang terkena dampak penggusuran. Begini penuturan Ngajiono warga terkena dampak penggusuran lahan Gumuk Pasir Parang Kusumo:

“Pertama ada surat edaran tentang akan dilaksanakannya penggusuran, kami dipanggil oleh pihak desa. Mekanismenya, pertama diberi surat pemberitahuan, kedua peringatan, ketiga dipanggil ke desa untuk sosialisasi. Setelah berhasil melakukan audiensi dengan pemerintah, intinya pemerintah memberikan solusi kepada kami. Menurut ketua Satpol PP Bantul, persoalan relokasi yang diinginkan warga itu harus maju hingga tingkat propinsi karena kewenangannya ada di sana. Pasca difasilitasi oleh ketua Satpol PP Bantul itu, kami berhasil melakukan audiensi dengan pihak pemerintah di tingkat propinsi. Poin yang kami terima hasil audiensi itu adalah, akan dibangunnya saluran air daerah Parang Kusumo bila kedapatan banjir jika musim hujan. Kini usulan kami sudah dilaksanakan walaupun belum maksimal. Sementara untuk relokasi warga, harus yang betul-betul memiliki kartu penduduk Bantul, dan sekarang sudah ada bangunan khusus untuk relokasi warga. Selain itu, tidak hanya relokasi yang diinginkan juga ada bentuk ganti rugi dari pemerintah. Namun ganti rugi sampai saat ini belum ada” (Ngajiono, 2018a).

Solidaritas para aktivis yang peka terhadap kasus agraria pun berujung manis. Namun perjuangan advokasi yang digagas melalui pintu masuk ARMP tidak bertahan lama. Toh, pada kenyataannya masih saja ada lahan warga yang masuk zona kawasan PGSP tetap digusur. Ternyata, kasus penggusuran yang terjadi disebabkan oleh kasus warga yang banyak bukan warga Parang Kusumo asli. Kenyataan pil pahit ini menjadikan warga prustasi. Bahkan, aliansi yang digagas itu pecah dipertengahan jalan. “Kasus Parang Kusumo itu memang krodit, ketika kami melakukan advokasi ternyata ada banyak warga yang bukan asli dari Bantul, kita kalah pada posisi ini” (Adi, 2018).

Perpecahan gerakan warga yang menolak penggusuran di mulai ketika ada aktor yang memiliki afiliasi lain. Aktor penggerak warga untuk melakukan aksi penolakan penggusuran terlena oleh buaian manis pihak kedua—bisa dari pemerintah maupun swasta. Tawaran relokasi yang diberikan pemerintah membuat warga mudah dipecah. Perpecahan arah gerakan pun menjadi buah simalakama. Tuntutan dan harapan warga terkena dampak penggusuran pupus di tengah jalan. Bahkan, rencana relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah hingga kini belum terealisasi. Hasil kesepakatan forum untuk membangun rumah, membayar ganti rugi dan lainnya telah sirna.

Peneliti membaca realitas ini karena berbagai faktor internal warga sendiri. Sebagian ada yang masih ‘kekeh’ berjuang membela atas hak yang seharusnya menjadi warga miliki. Sebagian lain, aktor penggerak perlawanan penolakan penggusuran telah bermain api dengan para politisi. Bahkan, ada aktor perempuan yang menjadi penggerak dalam aksi tersebut menjadi anggota partai politik. Tak ayal, bila kasus yang dibawa mereka cenderung dipolitisir. Skema politik regional Bantul pun terpecah ke dalam dua kubu—yang pro dan kontra. Partai politik yang pro terhadap gerakan warga menolak penggusuran adalah barisan oposisi secara skala nasional—sebut saja Partai Gerindra, PKS dan PAN. Namun yang paling vokal dalam kasus warga Parang Kusumo adalah PAN (Adi, 2018).

Narasi politik yang di bangun dalam kasus agraria di DIY memang berkaitkelindan dengan wacana arah pembangunan nasional. Tidak salah bila asumsi yang muncul, yang dialami oleh peneliti, memiliki keterkaitan erat dengan kasus agraria secara nasional. Selain itu, kasus agraria di Yogyakarta ini berkaitan langsung dengan pihak Keraton. Jadi, perspektif pembangunan antara nasional dengan daerah memiliki kesamaan. Yogyakarta sebagai kawasan strategis untuk membangun pertumbuhan ekonomi dalam sektor industri pariwisata dan jasa cukup menjadi perhatian para pelaku usaha secara skala nasional. Hal ini dapat kita lihat dengan skema proyek pembangunan jangka panjang di jalur lintas selatan. Jalur strategis penghubung antara kawasan barat dan timur, menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan pengembangan destinasi industri pariwisata yang menjanjikan (Haidar, 2018a).

Uji kelayakan pada aspek pembangunan dan pengembangan kawasan industri pariwisata yang mana fakta di lapangan menunjukan keterpaduan diantara tiga serangkai. Peran tiga serangkai ini diinisiasi oleh pihak akademis (UGM), pihak regulator (Pemda DIY), dan pihak investor. Warga sebagai korban atas kasus agraria tidak dapat berbuat apa-apa. Jika pun berjuang untuk melawan dalam mempertahankan hak mereka hanya menjadi kisah yang tercatat tak bertuan. Bagaikan bunga yang tumbuh di musim semi bila angin berhembus akan gugur dengan sendirinya. Begitu pula yang terjadi dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh warga menolak penggusuran yang tergabung dalam ARMP. Tak ayal, dalam perjalannya membangun kekuatan untuk berjuang mempertahankan hak atas tanah dan penghidupan selalu kalah.

Soliditas dan kesadaran warga untuk melakukan konsolidasi melawan penguasa dan pengusaha harus kalah di meja perundingan. Dengan demikian, kasus Parang Kusumo telah menjadi studi kasus gerakan sosial yang mengalami kekalahan secara struktural. Solidaritas para aktivis yang membantu untuk memperjuangkan hak atas tanah bagi warga pun tidak kuat. Hal ini disebabkan ada banyak warga yang menempati lahan kawasan konservasi Gumuk Pasir (Geo Maritim Park) tidak memiliki surat penting. Entah sifatnya kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat izin usaha dan lainnya. Pasalnya, perjuangan dapat berhasil bila warga yang menuntut memiliki surat kepemilikian lahan. Jika surat tersebut dimiliki warga, sejatinya bisa banding hingga ke meja hijau. Namun yang ada tidak demikian, justru warga banyak yang memiliki amunisi kosong ketika berjuang (Haidar, 2018b).

Perjuangan warga yang menolak penggusuran lahan pantai Parang Kusumo pada hakikatnya gerakan sosial yang terakomodir. Namun karena struktur kekuatan dalam organisasi yang dibentuk tidak begitu kuat sehingga menimbulkan banyak kelemahan [[15]](#footnote-15). Jejaring hubungan sosial dalam membangun kekuatan gerakan sosial begitu rapuh. Inilah salah satu alasan yang terjadi pada kasus gerakan sosial warga Parang Kusumo. Warga yang menolak penggusuran lahan pantai tidak terkoordinasi dengan baik, soliditas yang di bangun dapat dipecah dan aktor-aktor gerakan sosial tidak kuat secara legal hukum ketika mereka melawan. Legitimasi legal hukum inilah poin utama kekalahan mereka di ranah advokasi yang dilakukan.

*Gerakan Advokasi Non Ligitasi*

Yogyakarta sebagai gudang reproduksi pengetahuan yang dihasilkan dari ruang dealektis ratusan perguruan tinggi, menjadikan kota ini penghasil akademisi dan aktivis sosial. Pada saat terjadinya penggusuran warga lahan pantai Parang Kusumo sontak membuat para aktivis berempati dan bersimpati. Kepekaan yang terjalin para aktivis sebagai akibat ruang dialogis ilmu pengetahuan kritis. Atas dasar pengetahuan kritis ini kemudian membentuk satu pola kesadaran untuk melakukan advokasi (Hilful, 2018b). Proses advokasi yang tergabung dalam gerakan relawan warga tergusur sempat berjalan dengan baik. Skema advokasi yang dibuat terbagi ke dalam dua, yakni mendampingi warga yang memiliki sertifikat tanah dan yang tidak.

Perjalanan advokasi yang dilakukan para aktivis tergabung dalam aksi solidaritas. Aksi solidaritas yang digalang aktivis pada mulanya berjalan dengan skema. Namun setelah diketahui peta konflik yang ada, lambat laun para aktivis yang melakukan advokasi terpecah ke dalam dua pragmentasi. Pertama, secara jelas mereka yang mendukung aksi penolakan penggusuran. Kedua, ada sebagian aktivis yang membelot atau tidak mendukung aksi warga yang menolak penggusuran (Hilful, 2018c).

Bagi kelompok aktivis yang membela, kasus penggusuran warga Parang Kusumo adalah murni berbicara kemanusiaan (Hilful, 2018b). Namun sebagian kelompok aktivis yang membelot, kasus penggusuran memang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas politik sehingga ada tawar-menawar antar berbagai pihak (Haidar, 2018a; Adi, 2018). Dua pragmentasi kekuatan aktivis ini terlihat pasca aksi demontrasi. Setelah mengalami jalan buntu ketika audiensi dengan pihak pemerintah Kabupaten Bantul, atas saran ketua Satpol PP bahwa kasus Parang Kusumo memang dapat selesai jika sampai pada tingkat daerah propinsi bahkan nasional. Di sinilah mulai terlihat peran aktivis yang betul-betul murni memperjuangkan kepentingan warga dengan yang tidak.

Para aktivis yang lekat dengan aksi solidaritas atas nama kemanusiaan, pasca audiensi di tingkat propinsi, mereka melakukan aksi penggalangan dana. Aksi ini dilakukan dengan harapan dapat memperjuangkan kisah mereka hingga tingkat pusat. Pasalnya, kasus Geomaritim Parang Kusumo telah masuk ke dalam *blue print* program pembangunan nasional jangka panjang. Penggalangan dana sebagai modal melakukan konsolidasi sempat berjalan. Lagi-lagi karena dibenturkan landasan hukum atas legalitas tanah yang dimiliki oleh para korban maka tidak sampai ke tahap advokasi ditingkat pusat. Terlebih bagi warga yang hanya menumpang hidup di kawasan Gumuk Pasir tanpa memiliki identitas kependudukan dan akte kepemilikan tanah (Desi, 2018).

Beracuan kepada legalitas hukum ini maka aktivis dan warga yang tergabung dalam ARMP tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagian aktivis yang mengatasnamakan kemanusiaan memiliki langkah advokasi lain. Jika dilanjutkan hingga proses hukum maka tidak menutup kemungkinan perjuangan mereka pun sia-sia. Langkah advokasi yang dilakukan adalah dengan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, pendampingan bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran melalui program pendekatan budaya. Hampir semua warga yang tergusur beragama Islam, bentuk advokasi yang dilakukan melalui penguatan spiritual seperti tahlilan, yasinan, pengajian, sholawatan, ziarah dan sebagainya (Hilful, 2018c).

Kedua, program advokasi yang dilakukan para aktivis melalui bantuan ‘trauma healing’ agar masyarakat tidak takut untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya, khususnya bidang ekonomi. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan wirausaha. Masyarakat diajak bagaimana membangun konsep berwiraswasta dan pengelolaanya. Aksi solidaritas ini mampu bertahankan hingga saat ini. Sebagian warga yang tergusur tetap melanjutkan kegiatan usaha mereka di lokasi yang berbeda. Sementara bagi warga yang bertahan di Parang Kusumo, terus melanjutkan aktivitas kegiatan ekonomi seperti berjualan Mie Ayam dan Bakso di sekitaran tanah sengekata. Bila kita berkunjung ke lokasi, tentu Mie Ayam dan Bakso Mbah Kawit dapat di santap (Adi, 2018). Begitulah gerakan advokasi yang terjadi bagi warga terkena dampak penggusuran di Parang Kusumo.

*Perpecahan Gerakan Perjuangan Warga*

Penilaian mendasar tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh ARMP memiliki penilaian dari peneliti berkonotasi negatif. Hal ini dikarenakan rapuhnya perjuangan perlawanan yang dilakukan oleh warga yang terkena dampak penggusuran. Rapuhnya perjuangan yang ada karena tidak adanya koordinasi yang kuat sehingga soliditas yang dibangun seolah berjalan sendiri-sendiri dari berbagai aktor. Bila belajar pada tesisnya Tilly, kekuatan gerakan sosial dapat terwujud apabila ada kesadaran kolektif yang menyatu dalam struktur sosial [[16]](#footnote-16). Namun peneliti melihat bahwa kekuatan dalam struktur sosial dan kesadaran kolektif warga terkena dampak kasus penggusuran lahan pengembangan proyek Geo Maritim Park tidak tampak. Inilah salah satu persoalan pada perjuangan warga sehingga terjadinya perpecahan secara internal dalam basis kekuatan masa.

Perpecahan secara internal tersebut di awali ketika warga yang tergabung dalam ARMP dikooptasi ke dalam dua basis kekuatan massa. Pertama, kekuatan secara hukum bagi warga yang tergabung dalam ARMP tidak kuat—kepemilikan sertifikat tanah. Kedua, warga sendiri ada yang asli Yogyakarta yang secara kekuatan struktur sosialnya masih mempertahankan tradisi Keraton. Bagi kelompok warga yang masih mempertahankan tradisi Keraton sebetulnya kelompok yang tidak sepakat dengan adanya gerakan sosial. Mereka menganggap bahwa “hak-haknya sudah terpenuhi oleh Sultan sehingga buat apalagi melakukan gerakan sosial, toh pada kenyatannya, kami difasilitasi untuk keberlangsungan hidup kami” (Kawit, 2018).

Dari peta soal ini sebetulnya sudah bisa di analisis bahwa sebagian warga tidak setuju dengan adanya perlawanan atas kasus penggusuran yang menimpa mereka. Namun karena dorongan pihak luar (para aktivis) seakan menjadi ‘obor’ penyemangat bagi mereka yang ingin melakukan perjuangan untuk mempertahankan hak-hak atas tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun ditempati. Kompleksitas kerumunan sosial yang terjadi bukan juga tanpa sebab. Analisis peneliti dalam kasus perpecahan perjuangan yang tergabung dalam ARMP juga karena persoalan aktor politik yang bermain pada kasus mereka. Bukan untuk menghukumi aktor politik. Akan tetapi, realitas menunjukan ketika ada banyak aktor politik yang bermain dan menjadikan isu yang diangkat dapat memecah konsentrasi warga. Apalagi bila konteks tanah di wilayah pesisir pantai selatan sudah masuk ke dalam *masterplan* pengembangan pembangunan jangka panjang secara skala nasional.

Terlebih aktor-aktor politik yang berperan pada kasus Parang Kusumo tidak lain ada sebagian di dalamnya menjadi oposisi di sistem demokrasi secara nasional. Hal tersebut tentu saja dapat merubah peta gerakan warga—dapat memecah konsentrasi antara yang pro dan kontra. Satu sisi, kasus yang berkembang dapat menjadi alat oposisi untuk menyerang pemerintah terkait kasus-kasus agraria. Di sisi yang lain, independensi Keraton pada kasus Parang Kusumo pun masih dipertanyakan. Pada kondisi demikian membuat warga mengalami kebingungan. Di atas derita yang mendera warga ternyata masih ditemukan sebagian elit politik bermain peran. Ini terbukti ketika salah satu tokoh dari ARMP yang kini sudah menjadi pengurus partai politik (Ngajiono, 2018a).

Selain perpecahan di tubuh struktur sosial para pejuang penolakan penggusuran lahan pantai, juga pembela kasus (aktivis), ada banyak yang membelot dari misi awal. Sebagian aktivis yang pro terhadap penggusuran dan sekelompok lain kontra dengan penggusuran. Cita-cita perjuangan merebut kembali tanah yang mereka inginkan harus cidera di tengah jalan. Kelompok-kelompok aktivis pada kenyataannya masih saja ditemukan setengah hati membela kepentingan warga yang terkena dampak penggusuran.

Dari peristiwa yang telah terjadi peneliti dapat menganalisis bahwa kekuatan struktur massa dalam ARMP masih di dominasi oleh arogansi sebagian kelompok. Sikap arogansi yang tampak pada kasus ini dengan bermain peran ganda. Sebagian sebagai perwakilan hati nurani warga. Di lain kelompok merupakan kepanjangan tangan dari korporasi. Mengapa terjadi demikian? Harvey menyebutkan bahwa “*accumulation by dispossession* terus berlangsung dalam konteks neoliberalisme, yaitu ketika mekanisme pasar dipropagandakan dan dipeluk erat oleh para intelektual pro pasar dan pemangku kebijakan” [[17]](#footnote-17). Begitulah yang terjadi atas kasus yang menimpa warga terkena dampak penggusuran di Parang Kusumo.

Warga terpecah menjadi dua kelompok tadi tidak terlepas atas peran sentral para aktor intelektual pro pasar dan pemangku kebijakan yang menjadi bagian dari perwakilan para pengajur paham neolib. Di sinilah letak keterputusan perjuangan warga yang sebagiannya kelompok kontra atas penggusuran bermain mata dengan pemerintah dan investor. Alat legitimasi kekuatan politik melalui tangan lain pada kasus Parang Kusumo menjadi bukti kekuatan oligarki. Tak ayal, bila gerakan perjuangan warga seolah tersandra oleh kepentingan sekelompok elit.

**Penyelesaian Konflik Agraria di Atas Lahan Pembangunan Geo Maritim Park**

Perjalanan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan reforma agraria masih dihadapkan pada tembok ‘kapitalisme’. Tembok ini tampaknya masih sulit ditembus dalam sistem demokrasi Indonesia yang cenderung mengacu pada konsep liberalisme. Demokrasi liberal berkaitkelindan dengan semakin menjalarnya modernisasi yang hampir menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak bisa lepas dari sistem kapitalisme yang menginginkan keuntungan ekonomi-bisnis hanya dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki modal. Tak salah bila kita menyaksikan tanah-tanah di Indonesia kerap dipenuhi sengketa.

Persoalan sengketa tanah yang terjadi bukan tanpa alasan. UU Reforma Agraria tahun 1960, pada kenyataannya, belum berjalanan secara maksimal. Lebih tak elok, mekanisme perebutan tanah di negeri ini dengan cara-cara perampasan. Perampasan tanah yang dimaksud adalah “pengambilalihan tanah dan sumber daya alam oleh korporasi” [[18]](#footnote-18). Kata “perampasan” sendiri terfokus pada cara meraih sumber daya alam dalam menciptakan sebuah dinamika kepemilikan untuk dikuasasi secara individu. Kepemilikan yang dikuasai dapat berupa tanah, air, hutan atau sumber daya publik lain. Pada saat yang sama, konsentrasi kepemilikiannya melalui privatisasi dan transaksi yang terpusat pada kepemilikan korporasi. Hal ini tidak ubahnya sebuah sistem yang menjalar dalam sistem demokrasi neoliberal [[19]](#footnote-19).

Menjalarnya demokrasi neoliberal berbanding lurus dengan model oligarki yang terjadi dalam kekuatan pemerintah. Dalam perjalannya, oligarki berjalan dalam dua akumulasi kekuatan, yaitu antara pemilik modal yang berinvestasi dalam bisnis dan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Bahkan dalam mekanismenya, perampasan tanah selalu membutuhkan kekuatan negara sebagaimana representasinya adalah pemerintah. Hal tersebut dijalankan melalui mekanisme pembangunan. Salah satu bentuk yang nyata adalah tatkala negara terlibat dalam penawaran tanah (*state inducement*) terhadap investor melalui program pembangunan khusus. Misalnya, Zona Ekonomi Khusus atau Koridor Ekonomi, dengan alasan untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat [[20]](#footnote-20).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus penggusuran warga akibat dari dampak proyek pembangunan skala nasional. Skema pembangunan ini kerap dikenal dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Master plan yang dirancang dalam program jangka panjang nasional ini menjadikan Pulau Jawa, khususnya jalur lintas selatan, sebagai kawasan industri pariwisata, industri jasa, dan industri manufaktur (Haidar, 2018a). Begitu pula dengan kondisi yang terjadi di Yogyakarta. Sebagai wilayah yang cukup strategis, Yogyakarta bagian tidak terpisah dengan program pembangunan nasional.

Konsekuensi tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai aset penting bagi pembangunan dalam industri pariwisata secara skala nasional. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menghasilkan pajak negara begitu besar sumbangsihnya. Dalam catatan statistik menunjukan bahwa sektor pariwisata DIY setiap tahunnya terus meningkat. Berikut PAD dari sektor pariwisata DIY selama tahun 2012-2016.

*Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata DIY*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah** |
| 1. | 2012 | Rp.53.174.399.477,- |
| 2. | 2013 | Rp.88.839.015.344,- |
| 3. | 2014 | Rp.36.955.587.690,- |
| 4. | 2015 | Rp.266.993.359.315,- |
| 5. | 2016 | Rp.353.913.365.540,- |
| **Total** | | Rp.799.815.727.366,- |

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016.

Dari data yang tersaji jika diprosentasekan mengalami peningkatan yang cukup disgnifikan [[21]](#footnote-21). Berikut diagram prosentase peningkatan retribusi kepada PAD sektor pariwisata DIY tahun 2012-2016.

Dari data di atas sangat jelas bahwa sektor pariwisata cukup menjanjikan bagi pendapatan daerah. Dengan jumlah pendapatan prestis ini, apakah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kemudian apakah ketika melakukan pengembangan kawasan wisata di DIY berjalan dengan mulus? Inilah sesungguhnya persoalan yang terjadi. Tatkala pemerintah akan mengembangkan kawasan pariwisata dengan semakin tumbuh kembangnya industri di dalamnya sudah memperhatikan nasib hidup masyarakat. Pada faktanya, ada banyak kasus ketika pemerintah mengembangkan kawasan wisata justru yang terjadi harus berbenturan dengan warga. Pasalnya, ada banyak lokasi pengembangan objek wisata harus berbenturan langsung dengan warga yang sejatinya telah menempati lahan atau tanah kawasan pariwisata.

Di sisi lain, proyek pengembangan ekonomi sektor industri pariwisata di DIY turut berdampak terhadap kehidupan warga. Ada banyak warga harus berjuang mempertahankan tanah mereka di atas lahan proyek pembangunan ekonomi sektor industri pariwisata. Mulai dari sengketa lahan untuk pembangunan hotel, pembangunan bandara, pembangunan kawasan wisata desa, pembangunan Geo Maritim Park, dan masih banyak lagi kasus lain. Dalam lima tahun terakhir, setidaknya tercatat ada sekitar 20 kasus agraria di DIY. Hal ini berbanding terbalik dengan idealitas yang diharapkan oleh warga secara umum. Tatkala warga akan mengadu kepada Sultan, kadang berbenturan dengan UUK No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang di dalamnya ada persoalan pengaturan hak tanah [[22]](#footnote-22).

Di sinilah letak kegamangan warga yang berjuang mendapatkan hak tanah mereka. Terkadang, relokasi warga atas rencana pengembangan pembangunan jangka panjang dalam sektor pariwisata harus berbenturan dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun tidak menutup diri jika pada realitasnya pemerintah telah memberikan solusi atas sengketa yang terjadi. Namun penyelesaian sengketa cenderung mengabaikan hak-hak warga secara penuh. Inilah sesungguhnya realitas yang terjadi dalam mekanisme penyelesaian konflik agraria di DIY.

*Kasus Tanah Pada Sultan Ground dan Pakualaman Ground*

Persoalan hak tanah di DIY tidak akan ada habisnya. Hal ini terjadi karena Yogyakarta memiliki sistem sendiri dalam pengelolaan tanah. Ada banyak ditemukan jika warga yang tinggal di daerah istimewa tidak memiliki sertifikat. Bila diruntut lebih jauh, kasus tanah di DIY berawal dari respon Sultan terhadap UU PA. Kala itu, Keraton meresponnya dengan mendukung negara dalam mengimplementasikan UU PA. Pada gilirannya, implementasi kasus tanah tersebut dibagi ke dalam dua bagian, yakni *Pakualaman Ground* dan *Sultan Ground*. Wilayah Gunungkidul, Bantul, dan Kota ada banyak masuk kawasan *Sultan Ground*. Sementara Kulonprogo banyak masuk kawasan *Pakualaman Ground* (Haidar, 2018a).

Kawasan Sleman sedikit unik. Di daerah ini tidak begitu dominan dimiliki Kasultanan. Banyak warga yang memiliki sertifikat. Hal ini terbukti dengan percepatan pembangunan kawasan industri. Di Sleman sendiri ada banyak pabrik, toko ritel, Mall, hotel, dan lain sebagainya. Namun begitu, perizinan pembangunan tetap ada di bawah kendali Keraton. Dengan demikian, DIY itu kawasan unik dan cukup mendebarkan para aktivis pembela kasus tanah. Jika boleh jujur, sejauh kita melihat kawasan pembangunan dan pengembangan hotel di Sleman begitu menjamur. Ini membuktikan bahwa korporat telah masuk ke kawasan ini.

Di sisi lain, warga asli Yogyakarta banyak yang terlena untuk menjual aset tanah mereka. Hal ini menjadi persoalan sendiri bila kita telusuri *kasus per kasus* di saat munculnya konflik agraria. Satu sisi harus berhadapan dengan pemerintah yang representasinya dari Sultan, sisi yang lain korporasi telah masuk ke kawasan ini. Jika kita belajar pada persoalan sengketa tanah yang terjadi di daerah lain, warga harus berhadapan langsung dengan korporasi sehingga mekanisme kepemilikan tanah dilakukan secara oligarki. Sementara itu, di Yogyakarta—tanpa kita memperdebatkan kembali oligarki—sudah menjadi bagian dari sistem monarki yang di dalamnya tentu Raja sebagai penguasa yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Keunikan ini berlanjut ketika melihat hubungan konstitusi negara. Dengan sistem monarki, pada kenyataanya, Sri Sultan sekaligus sebagai Gubernur setiap tahun anggaran harus berpidato dihadapan para anggota DPRD. Ini artinya *ceck and balance* dalam fungsi legislatif berjalan di kawasan Raja. Dalam kasus lain misalkan, seorang Ratu harus berjuang merebut simpatik rakyat agar mendukung dirinya sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Di lain pihak, ternyata ketokohan sang Ratu berjalan mulus dengan atau tanpa, mungkin, mengeluarkan uang dalam kampanye politiknya. Pada gilirannya, setiap dentum politik pada perayaan demokrasi di negeri ini, ‘Sang Ratu’ dapat mencapai suara terbanyak bila dibandingkan dengan kandidat lain (lihat: Suara GKR Hemas tahun 2014 pada kontestasi DPD RI mencapai 1 juta lebih).

Pada konteks inilah peneliti menemukan bahwa politik lokal berjalan dengan baik. *Local wisdom* menjadi *role model* bagi para praktisi politik dibelahan daerah lain. Ternyata dinamika politik ini berjalan ketika kasus-kasus yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di Parangkusumo. Adalah sebuah kewajaran jika masyarakat yang menolak penggusuran terpecah menjadi dua klan—pro dan kontra. Bagi masyarakat pro menyebut bahwa mereka sudah *ta’dzim* dengan titah sang Raja. Di mana kekuasaan dan hukum tertinggi ada di tangan Sultan sebagai penguasa di negeri mereka. Di sisi yang lain, warga yang kontra, bila dilihat dalam realitasnya menunjukan penolakan warga atas penggusuran memang murni bukan masyarakat asli Yogyakarta.

Dari kasus penggusuran lahan pantai di Parangkusumo memberi pelajaran kepada kita bahwa warga Yogyakarta asli yang masih mendahulukan ‘rasa malu’ kepada Sultan. Tak ayal, bila peneliti menyimpulkan gerakan sosial yang diinisiasi oleh warga berujung pada kekalahan. Pasalnya, warga asli di negeri Mataram ini lebih mendahulukan sikap ‘*Memayu Hayuning Bawana*’. Filosofi Jawa ini masih melekat dalam diri setiap individu warga asli Yogyakarta. Lalu bagaimana dengan kondisi hak atas tanah yang terjadi sengketa? Tanpa berpijak ke dalam pembelaan benar atau salah, peneliti cukup memberikan apresiasi yang tinggi kepada sistem yang berjalan di *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*.

Ada yang menyebut bahwa Sultan telah merebut tanah rakyat. Isu miring ini dihembuskan dari luar warga asli Yogyakarta. Pasalnya, warga asli Yogyakarta masih menghargai filosofi luhur Jawa yang sampai saat ini kekuasaan tertinggi milik Raja atau Sultan. Toh kenyatannya, dalam beberapa kasus tanah yang terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak Keraton. Terlepas dari sengketa tanah yang belum usai, itu terjadi karena ada sebagian oknum yang tidak paham tentang posisioning Sultan dan sistem pemerintahan di DIY.

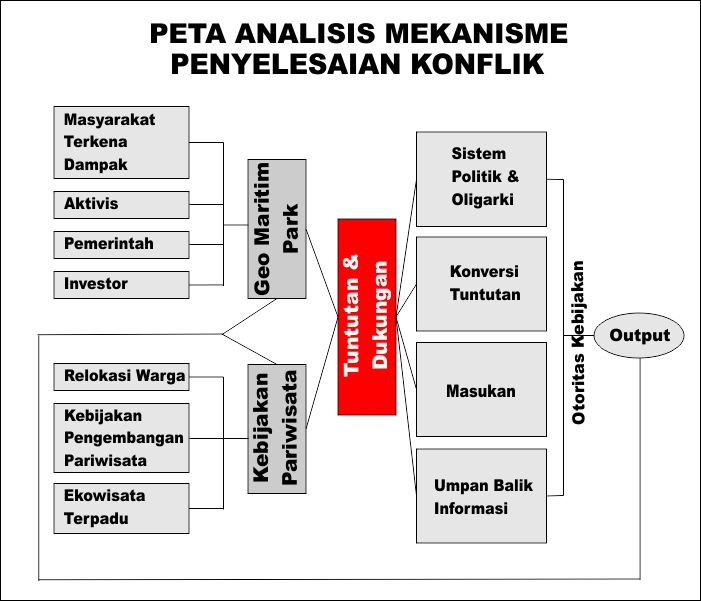
*Skema Penyelesaian Kasus Tanah Parang Kusumo*

Kasus tanah di Parang Kusumo membuat peneliti semakin menarik untuk mengskemakan realitas di lapangan pada saat relokasi. Dari catatan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti setidaknya ada empat subjek utama yang terjadi pada mekanisme penyelesaian konflik agraria, antara lain: (1) masyarakat terkena dampak; (2) aktivis sosial; (3) pemerintah; dan (4) investor. Pertama, masyarakat terkena dampak penggusuran peneliti petakan menjadi dua, yakni warga yang pro dan kontra. Bagi warga yang pro, berarti mereka yang mendukung di bangunnya sebuah pembangunan Geo Maritim Park. Sementara bagi yang kontra, mereka yang melakukan perlawanan terhadap penggusuran. Dalam realitas di lapangan, warga yang kontra pun pecah menjadi dua; satu yang masih murni memperjuangkan eksistensi mereka untuk mencari penghidupan, dan kedua, warga yang merelakan diri mau direlokasi atas tanah yang akan dibangunnya mega proyek Geo Maritim Park.

Kedua, posisi aktivis pada kasus penggusuran warga Parang Kusumo mengalami dilema. Keadaan dilema ini tidak telepas dari adanya posisi warga yang terpecah. Relawan aktivis yang menjadi advokator satu sisi mendukung penggusuran, di sisi yang lain, justru sebagian aktivis menolak penggusuran. Kondisi internal aktivis ini membuat warga mengalami kebingungan. Ketika melakukan aksi demonstrasi ada sebagian warga yang tidak menginginkan hal itu terjadi. Mereka merasa jika ikut demo akan berdampak pada kondisi pencarian nafkah terganggu. Hal ini disadari warga sendiri karena kekuatan legalitas sertifikat yang dimiliki tidak ada. Misalkan ketika akan melakukan aksi demonstrasi hingga ke pusat, secara jelas ada sebagian warga menolaknya (Hilful, 2018c).

Ketiga, pemerintah sebagai katalisator cenderung abai terhadap hak-hak warga karena sampai saat ini belum ditemukan titik temu antara harapan dengan kenyataannya. Dinamika ini terjadi karena pemerintah berpegang pada Perda No. 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025. Terlebih pengembangan kawasan industri pariwisata DIY mendapat dukungan dari pihak Keraton.

Keempat, investor merupakan pihak ketiga yang muncul pada kasus penggusuran lahan pantai Parang Kusumo. Peran investor pada kasus yang terjadi memang tidak tampak. Posisinya seperti bayangan semu dalam suasana keruhnya air yang mengalir tenang. Analisis ini di dapat tatkala peneliti melakukan konfirmasi berulangkali kepada para narasumber dari pihak pemerintah. Mereka menyebut “*tidak ada pihak ketiga, kasus di Parang Kusumo itu murni rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan pariwisata di Bantul*” (Karman, 2018). Namun ketika belajar pada kasus tanah lain yang ada di DIY, pihak ketiga akan muncul dalam keramaian pengembangan kawasan objek wisata Gumuk Pasir. Jika pengembangan Geo Maritim Park berjalan, tidak menutup kemungkinan pihak ketiga ini muncul sebagai alternatif. Seperti yang diketahui, pengembangan hotel, pengembangan pembangunan objek riset Gumuk Pasir sebagai wisata edukasi, dan lainnya bisa dipastikan akan diserahkan kepada pihak ketiga pembangunannya melalui jalur investasi. Berikut ini peneliti jabarkan mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi pada kasus penggusuran warga Parang Kusumo.



Sumber: peneliti, 2018.

Skema di atas menunjukan bahwa tuntutan dari warga terkena dampak penggusuran seyogyanya sudah masuk dalam program relokasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun realitas dukungan atas relokasi warga terkena dampak harus berhadapan dengan politik yang berjalan pada sistem pengendalian proyek pengengambangan industri pariwisata. Jika kita lihat skema tersebut, sangat jelas, otoritas kebijakan pengembangan pariwisata dimiliki penuh oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pusat. Sementara itu, tuntutan warga hanya sedikit dukungan yang memberikan umpak balik atas advokasi yang dilakukan.

Sampai saat ini, sejak peresmian Geo Maritim Park oleh Gubernur DIY, relokasi warga terkena dampak belum betul-betul berjalan maksimal. Sementara pengembangan proyek terus berjalan. Melalui kebijakan strategis pengembangan industri pariwisata di DIY, seolah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak didengar. Bahkan cenderung abai terhadap hak-hak atas keberlangsungan hidup bagi warga terkena dampak. Apalagi pasca demontrasi tahun 2016, ada banyak warga yang beralih profesi atau yang bukan warga setempat pulang ke kampung halaman mereka.

Konversi lahan sebagai pengembangan proyek pada faktanya masih dikuasai penuh pemerintah dengan sedikit mengabaikan aspirasi warga. Output dari kebijakan pengembangan pariwisata pun telah bermetamorfosa menjadi industri yang menjajikan bagi pemerintah. Namun jika kita lihat di lapangan sebetulnya warga yang terkena dampak penggusuran digandrungi rasa bimbang. Pasalnya, UUK No. 13 tahun 2012 dan Perda Kabupaten Bantul No. 18 tahun 2015 masih menjadi hukum kuat untuk melanjutkan pengembangan proyek pariwisata. Bila sebagian aktivis menganggap bahwa hal ini tidak lain kawasan DIY ingin dijadikan seperti layaknya Bali. Menurut Haidar, “*Jogja itu ingin dijadikan kawasan yang sama dengan Bali, sebagai kawasan pariwisata yang kadang pengembangannya mengabaikan hak-hak warga itu sendiri*” (Haidar, 2018b).

Inilah realitas yang terjadi di lapangan. Penyelesaian kasus tanah di Parang Kusumo sejauh ini masih belum usai. Titik temu antara keinginan warga terkena dampak penggusuran masih ditemukannya sikap *unfair* dari pemerintah. Namun tanda-tanda penyelesaian sengketa tanah pun lambat laun membuat warga jengah. Hal ini yang dirasakan oleh warga yang tidak memiliki sertifikat tanah. Pada gilirannya, warga yang tidak memiliki sertifikat akan tersingkir. Selain itu, banyak aktivis yang menyebut kasus di Parang Kusumo hanya sebagai kiasan dari percikan konflik yang menggurita. Kondisi konflik yang menggurita di lihat dari kacamata *masterplan* pengembangan kawasan industri pariwisata.

Dari sinilah peneliti menganggap perlu adanya kembali peninjauan ulang. Artinya, pembangunan berkelanjutan berbasis pariwisata perlu memperhatikan konversi lingkungan hijau. Pasalanya tidak menutup kemungkinan pengembangan kawasan pariwisata akan mengabaikan hak-hak lingkungan hidup. Dalam posisi ini, peneliti menganggap bahwa pemerintah sebagai *stakeholders* penting pembangunan, perlu mempertimbangkan dua segmentasi yang tidak terpisahkan, yakni keselarasan antara hak hidup manusia kebanyakan dengan hak lingkungan yang berbasis lahan hijau. Apalagi kita ketahui kawasan Parang Kusumo merupakan daerah yang dekat dengan pantai selatan. Bila di lihat pada aspek geologi, jika pemerintah mengabaikan konservi lahan hijau, amukan alam dari laut selatan dapat mengancam kehidupan manusia.

**Penutup**

Yogyakarta adalah salah satu kawasan strategis untuk dijadikan pengembangan industri pariwisata. Pengembangan industri model ini dapat menjadi asupan pokok bagi pemasukan pajak daerah dan nasional. Bila hal ini terwujud, secara langsung dapat memiliki kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri pariwisata dapat berpacu dengan trend dunia. Tak ayal, bila DIY masuk ke dalam zona Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Namun sedikit disayangkan. Implementasi MP3EI sebagai pemacu roda pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional harus dihadapkan pada pilihan pahit dalam pengembangannya. Pasalnya, ada banyak lokasi yang akan menimbulkan konflik sosial. Seperti yang terjadi pada kasus penggusuran lahan pantai untuk pembangunan Geo Maritim Park di Parang Kusumo Kabupaten Bantul. Alih-alih mengembangkan kawasan industri pariwisata, negara harus berhadapan dengan warga terkena dampak penggusuran. Wajar saja jika warga melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan alasan sumber penghidupan mereka di rampas.

Memang kasus agraria akan memeras keringat bagi siapapun yang terkait di dalamnya. Entah pihak pemerintah, swasta maupun warga itu sendiri. Namun posisi dilematis ketiga unsur tersebut tinggal bagaimana menempatkan posisinya dengan nalar kewarasan. Apakah bagi pengembang (swasta) atau pun pemerintah masih memiliki nurani untuk melindungi warga terkena dampak? Atau justru abai terhadap hak-hak individu masyarakat.

Pengalaman gerakan perlawanan warga terkena dampak penggusuran—tergabung dalam ARMP—menunjukan kepada kita ada sedikit kewarasan yang di miliki pemerintah. Peneliti tidak akan menjelaskan posisi oligarki karena sudah jelas dalam sistem monarki penuh dengan nuansa kebatinan tersebut. Namun setidaknya, kewarasan pemerintah yang dalam hal ini representasinya Sultan yang sekaligus Gubernur, dengan bijak menyikapi gejolak sosial yang muncul. Alternatif tawaran yang diberikan kepada warga masih mendapat ganti rugi. Walaupun ada sebagian warga yang terkena dampak penggusuran masih melakukan gerakan sosial. Hal tersebut cukup dapat dimaklumi.

Realitas lapangan pun menunjukan, perdebatan warga yang pro dan kontra tidak dapat dihindarkan. Itulah fakta masyarakat yang bersikukuh pada pendiriannya namun tidak dilengkapi oleh kekuatan hukum—dalam konteks ini legalitas atau sertifikat tanah yang harus di miliki warga. Keadaan warga pada kasus penggusuran lahan Geo Maritim Park di Parang Kusumo memang terpecah menjadi dua kubu. Pertama, warga merelakan diri untuk melepas tanah (yang memiliki sertifikat) mereka dengan konsekuensi ganti rugi—ini dapat dikatakan kelompok yang pro atau kebanyakan warga asli Yogyakarta. Kedua, kelompok warga yang kukuh pada pendirian melakukan perlawanan tanpa dilandasi kekuatan hukum—tidak memiliki sertifikat tanah (ilegal).

Kondisi warga di atas membuat para aktivis dan relawan pro kemanusiaan pun terpecah bahkan cenderung stagnan dalam pembelaan (advokasi sosial) terhadap mereka. Dengan demikian, gerakan sosial yang dilakukan oleh warga terkena dampak penggusuran di Parang Kusumo mengalami ‘kekalahan’. Begitu pula dengan posisi pemerintah yang dalam konteks ini masih bersifat netral. Pada gilirannya, aspirasi warga maupun aktivis pembela hak-hak warga tetap disambut baik oleh pemerintah.

**Daftar Pustaka**

Addi, M Idhom. “‘Urusan Tanah Di DIY Seperti Negara Dalam Negara.’” *Tirto.Id*. October 4, 2017. https://tirto.id/urusan-tanah-di-diy-seperti-negara-dalam-negara-cxLu.

Alsa, Asmadi. *Qualitative and Quantitave Approach with Combination of Psycologist Research*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Ananta, Dicky Dwi. “Politik Oligarki Dan Perampasan Tanah Di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah Di Kabupaten Karawang Tahun 2014.” *Jurnal Politik* 2, no. 1 (2016): 101–36. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83.

Fakih, Mansour. *Petani Dan Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Fukuyama, Francis. *Goncangan Besar: Kodrat Manusia Dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Hadiz, Vedi R. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005.

Harvey, David. *Neoliberalisme Dan Restorasi Kelas Kapitalis*. Yogyakarta: Resist, 2009.

Izudin, Ahmad. “GERAKAN SOSIAL DAN NALAR ISLAM PROGRESIF Mencari Titik Temu Kerangka Metateori.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (2017): 281–300. https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-04.

———. *Gerakan Sosial Petani: Strategi, Pola, Dan Tantangan Di Tengah Modernitas*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.

Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, Dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Luthfillah, Kiki. *Demokrasi Dan Kekuasaan Dalam Politik Lokal: Dominasi Kekuasaan Keluarga TB. Chasan Sochib Di Propinsi Banten*. Jakarta: UI Press, 2012.

Machfoedz, Mohammad Maksum. “Pedesaan Sebagai Sumber Pangan: Dalam Cengkeraman Gurita Neoliberalisme.” In *Ekonomi Politik Pangan*, edited by Francis Wahono. Yogyakarta: Cinde Books & Yayasan Bina Desa Sadajiwa, 2011.

Miles, and Huberman. *Qualitative Data Analisys*. USA: Sage Publication, 1994.

Mukmin, Zakie. “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda.” *Legality* 24, no. 1 (2016): 40–55.

Mustain. *Petani Versus Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Rachmawan, Dicky. “Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20, no. 2 (2015): 193–211. https://doi.org/https://doi/org/10.7454/mjs.v20i2.4618.

Rahmat, A, and A Izudin. “Impact Evaluation of Community Empowerment Programs with the Farmer Managed Extension Model.” *European Research Studies Journal* XXI, no. 2 (2018): 225–35.

Rozaki, Abdur. *Islam, Oligarki Politik, Dan Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Pascsarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Scott, James C. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Suaib, Eka, La Husen Zuada, and Waode Syifatu. “Desentralisasi Dan Oligarki Predator Di Wakatobi: Peran Oligarki Dan Elit Penentu Dalam Pembangunan Desa.” *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 167–91. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.55.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alpabeta, 2014.

Sujito, Arie. “GERAKAN DEMILITERISASI DI ERA TRANSISI DEMOKRASI: Peta Masalah Dan Pemanfaatan Peluang.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 121–38.

Sunardi, St. “Kajian Budaya: Pada Mulanya Adalah Perlawanan.” *Jurnal Retorik* 4, no. 2 (2003): 1–20.

Susanto, Nanang Hasan. “Gerakan Sosial Petani Desa Banjaranyar Dalam Memperjuangkan Lahan Pertanian.” *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2014): 295–314.

Susetiawan. “Para Petani Yang Tersisa Dan Nasionalisme.” In *Ekonomi Politik Pangan Kembali Ke Basis: Dari Ketergantungan Ke Kedaulatan*. Jakarta: Bina Desa & Cinde Books, 2011.

Tilly, Charles. “Social Movement and National Politics.” In *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*, edited by Charles Bright and Sandra Harding. Michigan: University of Michigan Press, 1998.

Tim Penyusun. “Statistik Dinas Kepariwisataan DIY 2016.” *Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, 2016.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.

White, Ben, M. Borras Saturnino, Ruth Hall Jr, Scoones Ian, and Wendy Wolford. “The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals.” *The Journal of Peasant Studies* 39, no. 3 (2012): 619–47.

Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zuber, Ahmad. “Konflik Agraria Di Indonesia.” *Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 147–58.

**Wawancara**

Adi. (2018, September 14).

Desi. (2018, Oktober 3).

Haidar. (2018a, September 11).

Haidar. (2018b, September 13).

Hilful. (2018a, September 5)

Hilful. (2018b, September 7).

Hilful. (2018c, September 8).

Karman. (2018, September 19).

Kawit. (2018, September 26).

Ngajiono. (2018a, September 12).

Ngajiono. (2018b, September 27).

Watin. (2018, Oktober 1).

1. St. Sunardi, “Kajian Budaya: Pada Mulanya Adalah Perlawanan,” *Jurnal Retorik* 4, no. 2 (2003): 1–20; Francis Fukuyama, *Goncangan Besar: Kodrat Manusia Dan Tata Sosial Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 65; Mansour Fakih, *Petani Dan Penguasa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 24–35. [↑](#footnote-ref-1)
2. (Ananta, 2016; Luthfillah, 2012; Rozaki, 2016; Suaib, Zuada, & Syifatu, 2016; Winters, 2012) [↑](#footnote-ref-2)
3. Mukmin, “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda”; Zuber, “Konflik Agraria Di Indonesia.” [↑](#footnote-ref-3)
4. Susetiawan, “Para Petani Yang Tersisa dan Nasionalisme,” in *Ekonomi Politik Pangan Kembali Ke Basis: Dari Ketergantungan Ke Kedaulatan* (Jakarta: Bina Desa & Cinde Books, 2011), 330. [↑](#footnote-ref-4)
5. James C Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 216; Mustain, *Petani Versus Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 18–19; Mohammad Maksum Machfoedz, “Pedesaan Sebagai Sumber Pangan: Dalam Cengkeraman Gurita Neoliberalisme,” in *Ekonomi Politik Pangan*, ed. Francis Wahono (Yogyakarta: Cinde Books & Yayasan Bina Desa Sadajiwa, 2011), 83–109. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dicky Rachmawan, “Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang,” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20, no. 2 (2015): 193–211, https://doi/org/10.7454/mjs.v20i2.4618; Ananta, “Politik Oligarki Dan Perampasan Tanah Di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah Di Kabupaten Karawang Tahun 2014.” [↑](#footnote-ref-6)
7. Asmadi Alsa, *Qualitative and Quantitave Approach with Combination of Psycologist Research*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007); Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010); Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alpabeta, 2014). [↑](#footnote-ref-7)
8. Miles and Huberman, *Qualitative Data Analisys* (USA: Sage Publication, 1994), 15–19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Winters, *Oligarki*, 18. [↑](#footnote-ref-9)
10. Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), 241. [↑](#footnote-ref-10)
11. Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2005), 169. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, Dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984). [↑](#footnote-ref-12)
13. Arie Sujito, “GERAKAN DEMILITERISASI DI ERA TRANSISI DEMOKRASI: Peta Masalah Dan Pemanfaatan Peluang,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 121–38. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ananta, “Politik Oligarki Dan Perampasan Tanah Di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah Di Kabupaten Karawang Tahun 2014”; Suaib, Zuada, and Syifatu, “Desentralisasi Dan Oligarki Predator Di Wakatobi: Peran Oligarki Dan Elit Penentu Dalam Pembangunan Desa.” [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmad Izudin, “GERAKAN SOSIAL DAN NALAR ISLAM PROGRESIF Mencari Titik Temu Kerangka Metateori,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (2017): 281–300, https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-04; A Rahmat and A Izudin, “Impact Evaluation of Community Empowerment Programs with the Farmer Managed Extension Model,” *European Research Studies Journal* XXI, no. 2 (2018): 225–35; Nanang Hasan Susanto, “Gerakan Sosial Petani Desa Banjaranyar Dalam Memperjuangkan Lahan Pertanian,” *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2014): 295–314. [↑](#footnote-ref-15)
16. Charles Tilly, “Social Movement and National Politics,” in *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*, ed. Charles Bright and Sandra Harding (Michigan: University of Michigan Press, 1998); Ahmad Izudin, *Gerakan Sosial Petani: Strategi, Pola, Dan Tantangan Di Tengah Modernitas* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017). [↑](#footnote-ref-16)
17. David Harvey, *Neoliberalisme Dan Restorasi Kelas Kapitalis* (Yogyakarta: Resist, 2009), 161. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ben White et al., “The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals,” *The Journal of Peasant Studies* 39, no. 3 (2012): 619. [↑](#footnote-ref-18)
19. White et al., “The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals.” [↑](#footnote-ref-19)
20. Winters, *Oligarki*. [↑](#footnote-ref-20)
21. Tim Penyusun, “Statistik Dinas Kepariwisataan DIY 2016,” *Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta, 2016). [↑](#footnote-ref-21)
22. M Idhom Addi, “‘Urusan Tanah Di DIY Seperti Negara Dalam Negara,’” *Tirto.Id*, October 4, 2017, https://tirto.id/urusan-tanah-di-diy-seperti-negara-dalam-negara-cxLu. [↑](#footnote-ref-22)